



► PENANAMAN MODAL

Pemkot Minta Investor Tak Takut

UMBULHARJO—Pemkot Jogja meminta kepada para investor untuk tidak takut menanamkan modalnya di Kota Gudeg ini. Kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu diharapkan tidak menjadi momok bagi para pengusaha untuk berinvestasi di Kota Jogja.

Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi mengakui bahwa terjeratnya mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti dan kepala dinas di lingkungan Pemkot Jogja menjadi momentum untuk menata sektor perizinan. Hanya saja, ia menyebutkan bahwa insiden itu tidak berdampak banyak terhadap iklim investasi di wilayahnya.

Menurut Sumadi, Pemkot tetap terbuka dengan pihak pengusaha untuk terus membangun Jogja berikut perekonomiannya. Ia pun

berharap agar penataan di sektor perizinan mampu membuat kepercayaan investor kian kuat untuk menanamkan modalnya di Kota Jogja.

"Setiap hari kami rapat koordinasi, izin yang sudah dikeluarkan ya kita evaluasi lagi. Pada prinsipnya kalau itu [OTT] dinilai menghambat investasi, ya tidak juga. Bahkan kami komitmen untuk terus memperbaiki," katanya, Selasa (14/6).

Sumadi berpendapat, OTT KPK dalam kasus dugaan suap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton sama sekali tidak menyentuh aspek substansi maupun prosedural dalam pelayanan perizinan di Kota Jogja. Menurutnya OTT KPK itu menindas dugaan suap atau gratifikasi soal pengurusan perizinan.

Dengan begitu, ia meminta kepada para investor agar tidak perlu ragu seandainya

ingin menanamkan modal di Kota Jogja. Sebab hubungan antara pemerintah daerah dan juga investor memang saling menguntungkan dalam aspek pembangunan wilayah, serta pula dapat menjadi pemicu penggerak roda perekonomian.

"Investor tidak perlu takut karena Kota Jogja tanpa investasi tidak mungkin jalan. Kami tetap terbuka, dengan catatan mereka mengikuti ketentuan-ketentuan secara prosedural dan tertib administrasi," ungkapnya.

Ia menyebut juga telah berkoordinasi dengan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di bidang perizinan bahwa kejadian OTT oleh KPK itu hendaknya jadi pelajaran yang berharga. ASN juga diminta untuk tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan seoptimal mungkin serta mengikuti ketentuan perundang-undangan. (Yosef Leon)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005